

MEMBEDAH PERS OTORITARIAN PADA REZIM ORDE BARU

Peninjau : Djoko Waluyo

Peneliti Komunikasi dan Media Puslitbang Aptika & IKP
Balitbang SDM Kominfo

Judul buku : Pers di Masa Orde Baru. Penulis : David T Hill . Penerjemah : Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo. Penerbit : Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan LSPP. Tahun : 2011. Halaman : xxi + 232

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan pers atau surat kabar pada masa Orde Baru dalam banyak kajian telah dijadikan obyek studi yang menarik. Studi dengan fokus perkembangan pers pada masa Orde Baru banyak dilakukan ahli komunikasi dari dalam negeri maupun dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Praktik pelaksanaan operasional pers banyak dikaji dari perspektif kebebasan pers yang dijalankan pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan rezim yang paling panjang diperintah oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya ataupun masa sesudah kejatuhan Orde Baru. Untuk meninjau perkembangan pers pada masa Orde Baru merupakan suatu kajian yang menarik dan banyak faktor yang perlu dicermati dari perkembangan pers masa Orde Baru. Sebab masa Orde Baru merupakan waktu yang cukup panjang dan tidak terputus masa pemerintahan presiden Soeharto. Serta dengan dinamika politik nasional, seperti keputusan menetapkan hanya 3 partai politik, yang sebelumnya jumlah partai sebanyak 10 partai yang cukup memberi pengaruh bagi perkembangan pers masa itu. Kemudian, kebijakan untuk penerbitan media pers harus memperoleh SIUPP yang dikelola Departemen Penerangan yang tidak lain bentuk membelenggu media yang dapat dikatakan sebagai kebijakan keras terhadap media dengan rancangan Menteri Penerangan Mayjen TNI Ali Moertopo. Lembaga SIUPP ini ditiadakan ketika proses dimulainya era Reformasi, sehingga terjadi deregulasi terhadap penerbitan media dan dunia komunikasi dan informasi yang cukup signifikan.

Perkembangan pers pada masa Orde Baru telah banyak dikaji dari berbagai perspektif pandangan. Untuk memberikan beberapa fakta, tercatat dari sarjana dalam negeri, diantaranya telah dikaji oleh Dr. Gati Gayatri dengan disertasinya di FISIP Universitas Indonesia tahun 2002, dengan judul 'Konstruksi Realitas Kepemimpinan Presiden Soeharto dalam berita surat kabar- Analisis Kritis terhadap pesan-pesan politik Presiden Soeharto yang disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol budaya Jawa'. Hasil studi ini menunjukkan

bagaimana dan mengapa media hanya berperan memberikan dukungan kepada penguasa dan mempertahankan status-quo pada era Orde Baru.

Kemudian Dr. Zulhasril Nasir, M.Si, dosen departemen ilmu komunikasi dari FISIP UI tahun 2009 mengupas pelaksanaan kebebasan pers dari perspektif ekonomi politik media. Diantaranya, dianalisis bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kuat terhadap pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia, di antaranya dari pengaruh penguasa, pemasang iklan, maupun organisasi media dan pemilik media itu sendiri. Berbagai faktor itu mempengaruhi implementasi kebebasan media untuk menyajikan informasi yang obyektif dan aktual.

Kajian yang menarik ditulis dalam disertasi Dr. Henri Subiakto (2010: 102) dari Universitas Airlangga, Surabaya membahas tentang dinamika politik ekonomi dari media masa Orde Baru tahun 2010. Judul disertasi 'Kontestasi wacana tentang analisis konstruksi sosial relasi negara, industri penyiaran dan *civil society*'. Studi secara kualitatif ini, di antaranya memberi simpulan, bahwa posisi *civil society* pada dasarnya masih lemah dalam relasinya dengan negara dan industri. Hasil analisis dalam studi ini bukan hanya memberikan simpulan, namun juga pengelanaan pemikiran dan teori dalam konteks sistem penyiaran yang demokratis di Indonesia. *Civil society* lebih banyak berperan dalam level wacana, namun di level normatif dan implementasi, *civil society* amat lemah. Posisi *civil society* yang kuat sebagaimana teori Habermas belumlah terjadi. Sementara itu, pada level normatif, dominasi interpretasi negara lebih tampak dibandingkan agen yang lain. Interpretasi negara berlaku sebagai aturan normatif, bahkan diperkuat keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan konsolidasi negara setelah reformasi. Sedangkan di aras implementasi, kalangan industri atau pelaku penyiaran memiliki cara dan interpretasi sendiri yang cenderung pragmatis, sesuai kepentingan bisnis. Kalangan industri mengimplementasi aturan dan mewarnai dikursusnya lebih banyak dengan pendekatan pasar bebas. Hal ini dikarenakan posisi industri sebagai pelaku utama sistem penyiaran memiliki kepentingan langsung terhadap sistem yang sudah ada. Bagi industri sistem lama telah memberikan banyak keuntungan, melakukan perubahan sebagaimana tuntutan ideal justru merupakan ancaman yang tidak menguntungkan.

Dari bagian simpulan tersebut, nampak bahwa fenomena regulasi penyiaran masih perlu ditata lagi, sementara itu ruang kebebasan media belum sepenuhnya dapat dijalankan perannya oleh media dalam era reformasi ini.

Yang agak monumental tentang perkembangan media di era Orde Baru ditunjukkan dalam disertasi Dr. Daniel Dhakidae yang membedah pertumbuhan media dari pers perjuangan masa kemerdekaan hingga tumbuh sebagai media industrial seperti sekarang ini. Kondisi pada masa Orba banyak memberi peluang untuk makin berkembang media sebagai bentuk pers industri. Berita menjadi komponen penting sebagai komoditas yang dijual kepada publik. Serta iklan yang

menduduki porsi penting lainnya dari media sebagai nilai ekonomis yang menghidupkan roda organisasi dan manajemen media.

Sementara itu, kajian dari para sarjana luar negeri, di antaranya David T Hill yang minatnya besar terhadap perkembangan media di Indonesia cukup memberi warna tersendiri dalam pemikirannya mengenai perkembangan media. Hill berpendidikan sarjana mengenai Asian Studies, di Australian National University di Canberra. Kini ia mengajar di Southeast Asian Studies di Murdoch University, Perth, Western Australia. Buku yang ditinjau ini ditulis tahun 1995 dan baru diterjemahkan tahun 2011 ini. Sebelumnya buku ini dalam bahasa Inggris telah beredar luas di kampus-kampus di luar negeri. Dari fakta di atas, ternyata sangat menarik untuk mengkaji perkembangan media pada masa Orde Baru, hingga kini fokus tersebut masih menjadi kajian untuk mengungkap lebih jauh apa, mengapa dan bagaimana media yang berkembang pada masa Orde Baru untuk kepentingan intelektual dan implementasi pada masa Reformasi dewasa ini dan kedepan.

Paparan isi buku

Buku ini cukup tebal dan rinci dalam penulisannya, terdiri dari 6 bab, ditambah 4 tabel dan sejumlah daftar pustaka yang sangat lengkap mengenai perkembangan media pada masa Orde Baru. Catatan sejarah dan fakta-fakta tertulis ini berguna bagi pembaca yang akan mendalami riset tentang media cetak lebih lanjut.

Bab 1 mengenai Pra Orde Baru. Isinya memberikan sejarah latar belakang singkat dari pers di Indonesia, mulai dari lahirnya surat kabar pertama di wilayah yang semula dikenal sebagai Hindia Belanda pada tahun 1745, sampai masa gejolak sosial dan politis yang menandai tahun-tahun awal periode 1960-an (hlm.13). Pada awal mulanya bangsa Belanda yang berinisiatif menerbitkan surat kabar dan mengajarkan pribumi mengenal media. Dengan demikian, fungsi media pada masa sejarah nasional dapat berjalan sehingga media berperan sebagai sarana informasi dan pendidikan rakyat, namun juga sebagai alat perjuangan untuk melepaskan diri dari jajahan kolonialis Belanda. Kemudian memasuki awal kemerdekaan, peran media atau pers makin penting dan menjadi alat utama perjuangan mencapai kemerdekaan oleh berbagai organisasi masyarakat yang berhaluan politik nasionalis dan keagamaan.

Bab 2 dalam buku ini, menggarisbawahi perkembangan sepanjang Orde Baru, dengan mencatat secara khusus periode-periode di mana pemerintah melancarkan aksi-aksi anti pers dan liberalisasi serta ekspansi ekonomi yang berlangsung kemudian. Materi bab 2 ini berlandaskan pada argumentasi bahwa sementara tahun-tahun awal Orde Baru dari Presiden Soeharto ditandai dengan pembreidelan massal, respon industri secara umum adalah untuk melakukan 'swa-regulasi', membiarkan akumulasi modal dan tekanan-tekanan pasar menjadi

kekuatan-kekuatan utama yang menentukan bagaimana media berelasi dengan negara. Kasus-kasus pembreidelan yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan suatu langkah mundur ke masa lalu, yang memiliki kecenderungan yang kecil untuk tumbuh di tengah-tengah kecenderungan umum ke arah liberalisasi yang muncul sejak pertengahan periode tahun 1980-an.

Peran media dalam masa Orde Baru dipakai sebagai sarana propaganda pemerintah untuk menggerakkan pembangunan nasional. Media pers dari perspektif sejarah pada masa Orde Baru sangat dominan dipengaruhi oleh pengawasan dari penguasa sehingga realitas media berisi informasi dengan bahasa sebagai realitas simbolis dalam kehidupan pers pada praktiknya banyak digunakan sebagai ruang penggelaran kekuasaan oleh struktur dominan. Pemerintah Orde Baru telah menggunakan bahasa dalam dunia media massa sebagai wahana kooptasi, subordinasi, dominasi dan imperialisme kesadaran medan semantik masyarakat (Subiako, 1997: 96). Kekuatan bahasa dipakai untuk mempengaruhi dan menjalankan propaganda pemerintah Orde Baru untuk kepentingan dan tujuan-tujuan politiknya. Kebebasan pers yang merupakan atmosfir pertumbuhan dan perkembangan media telah dipengaruhi oleh penguasanya sendiri untuk kepentingan politiknya.

Bab 3 menelaah upaya-upaya yang dilakukan lewat kontrol legialasi dan struktur korporasi untuk melindungi media cetak. Bagian bab 3 menggambarkan kebijakan yang relevan dari Departemen Penerangan RI, dan organisasi-organisasi profesional yang mengelola dan menyalurkan aktivitas-aktivitas semua pekerja, dan semua aspek, dalam industri. Berbagai badan regulasi pemerintah dibicarakan dalam bab 3, seperti Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Pencerbit Surat kabar (SPS), yang juga merupakan struktur regulasi penting yang beroperasi membatasi media. Bab 4 memfokuskan pada ekspansi dalam hal sirkulasi dan pasar, seiring dengan berubahnya pola kepemilikan dan *control financial*, terutama dengan munculnya kekaisaran media dan dampak breidel yang terjadi. Empat konglomerat pers metropolitan utama yang dibahas secara mendalam yaitu seputar *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Tempo* dan pendatang yang relative baru *Media Indonesia*. Seiring dengan kemunculan kekaisaran-kekaisaran media seperti ini, maka kepentingan dari orang-orang yang dekat dengan mereka dan orang-orang yang berada dalam keluarga kepresidenan akan dikaji sebagai simbol dari fase baru dalam hubungan antara pers dengan negara. Dalam bab 5, dikaji masalah-masalah dan kontribusi-kontribusi khusus dari pers daerah yang mulai banyak bermunculan, pers agama (terutama pers Islam), pers mahasiswa yang pernah berperan besar dalam perjuangan menegakkan Orde Baru di awal tahun 1966, dan media yang berbahasa asing (terutama media berbahasa Inggris dan berbahasa Tionghoa), yang seringkali terabaikan dalam berbagai kajian tentang pers nasional berbahasa Indonesia.

Bab 6 yang merupakan bab terakhir dari buku David T Hill ini mengulas pertimbangan-pertimbangan secara lebih umum dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri kepada masyarakat secara umum, terutama dalam kontradiksi yang terjadi di dalam elite yang berkuasa, dan menawarkan sejumlah perkiraan terkait tren industri media di masa mendatang. Bab 6 ini mendiskusikan segmentasi pasar yang semakin canggih dan strategi ekspansi yang dikerahkan oleh sejumlah operator pers yang berhasil seraya mereka beradaptasi dengan kesenjangan demografis, sosial dan geografis, dalam sebuah industri yang menghadapi masa depan yang semakin lama semakin kompetitif. Secara signifikan, tampak bahwa penekanan sebelumnya pada surat kabar berbendera 'nasional' akan menurun, sementara ceruk-ceruk pasar semakin diisi oleh surat-surat kabar yang inovatif, dikelola dengan baik ditingkat subnasional atau daerah di satu sisi, sementara disisi lain bahkan diisi oleh penerbitan bermodal 'transnasional' (yang dimungkinkan oleh globalisasi teknologi informasi). Dalam bagian akhir buku David T Hill ini disajikan catatan untuk bacaan lebih lanjut, terutama bagi mereka yang tertarik untuk mendalami riset tentang media cetak di Indonesia. Catatan yang diberikan Hill agak lengkap dalam perspektif sejarah perkembangan media pada masa Orde Baru, sehingga peneliti yang berminat dapat menelusuri dengan mudah dan teliti.

Pemikiran Kebebasan Pers (di) Dunia

Konsep kebebasan pers menurut buku ini lebih melihat dari perspektif positivisme. Pendekatan pemikirannya lebih pada hal-hal yang nyata. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan sumber-sumber data tertulis yang luas. Kemudian data primer bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber wartawan senior di Indonesia. Pembabakan dalam tiap periode mengikuti kronologi waktu. Mulai dari munculnya media di tanah Hindia Belanda (hlm.21-22), masa perjuangan nasional, masa mencapai kemerdekaan, masa Orde Lama (hlm. 23-28). hingga periode Orde Baru sebagai bagian yang agak panjang dalam fokus buku Hill ini. Fenomena yang dicatat dari fakta tiap periode waktu terhadap implementasi kebebasan pers, bahwa pihak penguasa menerapkan regulasi 'pers breidel'. Artinya terjadi pengekanan terhadap kebebasan pers. Pembahasan dalam buku T Hill ini lebih bercorak positivisme dan ada juga dimensi konstruktivisme untuk menggambarkan kembali 'jalan cerita' yang terjadi pada waktu itu (masa Orde Baru) dengan narasi dan analisis yang kritis dan tajam. Pembahasan implementasi kebebasan pers digambarkan secara detail dan terinci sehingga konstruksi kondisi pada waktu itu dapat digambarkan dengan tepat.

Bagaimanakah pada hakikatnya konsep kebebasan pers itu sesungguhnya dan dinamika pemikiran yang terjadi dalam dunia akademik terhadap kebebasan pers itu ? Bahwa perjalanan pemikiran mengenai konsep kebebasan pers terus dilakukan para ahli komunikasi dan media. Kebebasan pers sebagai suatu konsep

merupakan bagian dari konsepsi demokrasi Barat. Negara-negara demokrasi di dunia, makin banyak yang memberikan ruang bagi tumbuhnya kebebasan pers. Ada hubungan antara kebebasan pers (dapat dibaca sebagai media yang bebas) dan demokrasi. Hal ini nampak jelas bahwa pada umumnya Negara-negara yang demokratis juga memiliki pers yang bebas. Pertanyaannya, apakah media bebas (adanya kebebasan pers) yang menumbuhkan demokrasi, atau demokrasi yang mengembangkan media bebas? (Roumeen Islam, 2006: 3). Tampaknya terdapat korelasi yang cukup signifikan antara kebebasan pers dan demokrasi. Dari perspektif

Bagaimana konsep kebebasan pers dipahami dalam masa sekarang ini ? Menurut Robert L Stevenson dalam artikelnya berjudul “Freedom of the Press Around the World” pada buku *Global Journalism* (1995: 63-67) , baik disuatu Negara maupun diantara Negara-negara di dunia masih sering terjadi perbedaan persepsi dan pemaknaan terhadap konsep kebebasan pers dan siapa pemilik kebebasan pers. Di banyak Negara di dunia, kebebasan pers masih belum menjadi komoditas dan tujuan di bagian besar Negara-negara demokrasi berbasis pasar Barat setelah runtuhnya komunisme.

Konsep kebebasan pers, tampaknya tidak mempunyai definisi atau batasan yang jelas. Kebebasan pers lebih dapat dipahami bila dioperasionalkan dalam pengertian praktik kebebasan pers dalam suatu Negara atau di banyak Negara di dunia. Namun demikian, konsep kebebasan pers dapat dirunut dari teori normative media (*normative theories of media*). Teori normative media mengasumsikan bagaimana seharusnya media tersebut berperan dalam realita sosial atau bagaimana sebenarnya media berfungsi, bilamana serangkaian nilai sosial ingin diterapkan dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai tersebut. Jenis teori normatif media ini berperan dalam membentuk institusi media, harapan publik terhadap media , bagaimana media harus memainkan peran secara esensial.

Teori normative media mempetakan atau mempolakan 4 kategori sistem media berdasarkan pemikiran ilmiah bukan dari hasil riset lapangan. Untuk menguji teori normative media dapat dibandingkan dengan bagaimana pelaksanaan kebebasan pers dalam suatu negara. Dengan demikian, dari literatur ilmu komunikasi, teori normative media berasal dari pengamatan, bukan dari hasil uji dan pembuatan hipotesis dengan menggunakan metode ilmu social (Severin-Tankard, 2005:373). Teori normative media bermula dari pemikiran Siebert, Peterson dan Schramm tahun 1956 yang dituangkan dalam bukunya “Empat Teori Pers”. Yaitu teori pers otoriter, libertarian, teori pers bertanggung jawab sosial dan teori pers komunis Soviet. Teori pers otoriter, diakui sebagai teori pers paling tua, berasal dari abad ke-16, berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Jadi, pada dasarnya, pendekatan dilakukan dari atas ke bawah. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan kepada negara. Kebebasan bagi pers difokuskan atau dijalankan untuk kepentingan penguasa.

Teori pers kedua, yaitu teori pers libertarian atau teori pers bebas. Teori ini mencapai puncaknya pada abad ke 19, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran. Kemudian berkembang pandangan dalam teori ini, pers perlu mengawasi pemerintah. Dari sini atribut pers sebagai the fourth estate setelah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian. Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah.

Dua teori lainnya, *social responsibility theory* (teori pers bertanggungjawab sosial) dan *Soviet communist theory* (teori pers komunis Soviet) dipandang sebagai modifikasi yang diturunkan dari kedua teori sebelumnya. Teori pers bertanggung jawab sosial dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers bebas, para pemilik dan para pengelola pers yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik (fungsi gatekeeper) dan dalam versi apa (fungsi framing berita). Teori pers libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah proses kebebasan internal dan proses konsentrasi pers. Teori pers bertanggungjawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggungjawab sosial.

Denis McQuail menambahkan 2 teori pers lagi, yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratik. Teori pers pembangunan oleh McQuail dikaitkan dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri sistem komunikasi yang sudah maju. Pada tahun 1967, dengan berdirinya Press Foundation of Asia menawarkan konsep jurnalisme pembangunan yang mendapat sambutan bagi negara-negara berkembang. Unsur positif dari pers pembangunan, bahwa pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional.

Teori pers partisipan demokratik lahir pada masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan sentralisme dari birokratisasi institusi-institusi siaran publik yang timbul dari tuntutan norma tanggungjawab social. (McQuail, 1991:121). Inti dari teori partisipan demokratik terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan dan aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai keserbaragaman, skala kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat dan interaksi.

Kemudian, ada versi konsep normative yang lebih sederhana yang dikemukakan Altschull (dalam McQuail, 1991:122), yang menyebutkan 3 bentuk dasar system pers. Yaitu: (1) Sistem "pasar" dikaitkan dengan Dunia Pertama (kapitalis-liberal); (2) Sistem Marxis dikaitkan dengan Dunia Kedua (sosialis-Soviet), (3) Sistem "berkembang" yang dikaitkan dengan Dunia Ketiga (negara-negara sedang berkembang). Sistem pertama merupakan gabungan dari unsur

pers bebas dengan unsur tanggungjawab sosial. Sistem kedua merupakan model Soviet, dan sistem ketiga mewakili teori pembangunan (perkembangan). Ketiga sistem memiliki beberapa persamaan, namun Altschull menegaskan bahwa masing-masing sistem itu memiliki konsep dan tanggungjawab pers yang berbeda. Pandangan teori pasar terhadap kebebasan sangatlah berbeda, terutama dalam hal definisi kebebasan yang mengandung makna negatif (tidak adanya kontrol atau kebijakan pemerintah). Berbeda dengan kedua teori lainnya, teori pasar memandang tanggungjawab sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban memberikan informasi nonpolitis atau walaupun bersifat politis penerapannya haruslah adil (tidak memihak). Teori berkembang memiliki ciri khas tersendiri, yakni perhatiannya dalam upaya mempersatukan masyarakat, bukanlah memecahbelah masyarakat. Dan Altschull mengingatkan akan keterbatasan teori normative dalam menggambarkan kenyataan, terutama bagi mereka yang melakukan kontrol dan bekerja di media. Konsep kebebasan pers sangat tergantung pada sistim politik dimana pers itu berada. Dalam negara komunis atau otoriter, kebebasan pers dikembangkan untuk membentuk opini pers yang mendukung penguasa. Sedangkan dalam negara liberal atau demokrasi, kebebasan pers pada prinsipnya diarahkan untuk menuju masyarakat yang sehat, bebas berpendapat dan berdemokrasi. Bila secara umum, definisi kebebasan pers dapat diartikan sebagai kebebasan untuk menyebarkan informasi dan pikiran-pikiran melalui media massa tanpa adanya kekangan pemerintah (Blake-Haroldsen,2005:125). Dari konsep-konsep kebebasan pers yang bersumber dari "empat teori pers", maka pelaksanaannya dapat diasumsikan sesuai dengan pemikiran, pedoman dan nilai-nilai yang dikembangkan dari 'empat teori pers' tersebut. Sementara itu, bila dianalisis lebih lanjut, kebebasan pers yang dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, Orde Lama, Orde Baru hingga masa awal Reformasi hanya menekankan pada salah satu faktor dari kebebasan pers tersebut, yaitu pelarangan atau pengekangan terhadap media.

Prospek Kebebasan Pers Indonesia

Di Indonesia, norma kebebasan pers yang dikembangkan saat ini adalah kebebasan pers dalam konteks pembangunan demokrasi yang sehat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Pasal 28 menyatakan : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Kemudian lebih jauh dalam Amandemen UUD 1945 tentang

pasal 28F:” Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selanjutnya konsideran regulasi mengenai pers menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Wartawan dalam menjalankan jurnalismenya memerlukan kondisi sosial yang bebas. Artinya tugas jurnalisisme wartawan sangat dipengaruhi oleh kondisi kebebasan pers dalam masyarakat. Kebebasan pers yang sehat dapat mendorong menuju pada tatanan masyarakat yang demokratis. Prasyarat tumbuhnya suatu negara demokrasi, di antaranya adanya kondisi kebebasan pers yang luas dalam masyarakat dan negara tersebut. Serta terdapat ruang publik yang terbuka dalam media yang bebas.

Kondisi yang lebih maju seperti ruang publik dalam media, tidak atau belum terbentuk pada media dalam masa Orde Baru. Disebabkan kondisi media yang dikekang dan selalu diintervensi penguasa yang mengarahkan media untuk menjalankan peran yang menguntungkan penguasa. Media sebagai sarana propaganda. Dalam buku T. Hill, pada bab 6 dengan tajuk Menyongsong Masa Depan (hlm 171), ternyata media di Indonesia dengan analisis yang tajam masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan. Faktor-faktor itu adalah fluktuasi ekonomi (hlm 173) dengan variabel adanya perang Teluk, pendapatan lewat iklan yang banyak disedot oleh media penyiaran.

Kemudian faktor sekularisasi, yang menggerus orientasi idealisme media yang makin berkembang. Pada awalnya sebagai ‘koran dengan orientasi agama tertentu’, seperti Kompas dan Suara Pembaruan, namun dalam perjalanan waktu untuk menguasai pasar, koran-koran ini beralih sebagai koran komersial dengan konsep komodifikasi berita dan iklan. Koran ‘perjuangan’ seperti harian Merdeka, yang dikemudian hari ternyata tidak dapat meneruskan penerbitannya alias mati. Padahal Merdeka pernah mencapai puncak penjualannya diangka 100.000, yang kemudian anjlok ke sekitar 30.000 pada tahun 1990 (hlm.178). Pendatang baru koran Republika yang masih eksis hingga kini, pada awalnya kuat berorientasi pada idealisme agama Islam, dan tetap kukuh hingga kini (hlm.179). Faktor ketiga, perlu menerapkan strategi pasar untuk mengatasi persaingan demi meningkatkan sirkulasi (hlm.179). Namun perlu juga dicermati pertumbuhan media lokal yang bakal menguasai pasar di berbagai daerah potensial yang tingkat pembangunan ekonomi daerahnya juga berkembang. Dengan demikian ada kemungkinan media nasional bakal stagnan, sedangkan media lokal terus tumbuh dan berkembang mendekati komunitas atau pembacanya. Faktor keempat yaitu

globalisasi, sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin pesat, maka imbasnya media juga dapat melakukan 'cetak jarak jauh'. Bahkan kini makin tumbuh untuk mengadopsi etos dan praktik industri pers internasional Anglo-American semakin kuat (hlm.186). Di Tanah Air kini terjadi industri pers dalam negeri berkompetisi dengan perusahaan pers internasional. Perkembangan ini sudah terjadi dewasa ini, baik di media cetak maupun media penyiaran, dengan digunakannya televisi satelit seperti CNN, BBC, ABC, TV3 Malaysia dan masih banyak lagi.

Faktor kelima yaitu kontrol dan pengaturan mandiri. Perkembangan media dengan kondisi keterbukaan politik, dan pengaruh globalisasi ekonomi, bila tidak dilakukan kontrol secara mandiri oleh perusahaan media itu, maka dapat terseret dalam arena bisnis media internasional yang bakal mematikan diri sendiri. Media dalam negeri perlu membenahi diri dari aspek organisasi dan modal maupun sumberdaya manusia dan teknologi, untuk menguasai pasar dalam negeri agar dapat eksis dan makin sehat finansialnya. Demikian pula regulasi pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan media dalam negeri. Namun gempuran kapitalisme sekaligus bersamaan dengan tuntutan demokratisasi, makin menjadikan peran media dalam menjalankan kebebasan pers, akan makin berat. Tantangan yang kontradiktif antara kapitalisme dan demokratisasi tidak demikian saja dapat diwujudkan bagi media dalam negeri. Banyak faktor yang saling terkait yang perlu diselaraskan agar dapat mencapai eksistensi media tetap tegak dan sehat. Buku David T.Hill ini sangat berguna dibaca oleh para mahasiswa dalam program studi komunikasi massa, jurnalis, maupun public relation serta praktisi media, jurnalis, dan para peneliti bidang komunikasi media. Pembahasan buku ini sangat lengkap dan cukup baik sebagai sebuah buku 'sejarah' perjalanan media di masa Orde Baru, dengan fokus pada perjalanan pers pada masa Orde Baru yang bercorak otoritarian. Penguasa Orde Baru telah memperlakukan media dengan sistem pers otoriter, dimana media tidak dapat berperan sebagai wahana demokratisasi yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

Buku :

- Blake, Reed H dan Edwin O. Haroldsen (,2005). Taksonomi Konsep Komunikasi. Surabaya: Papyrus.
- Islam, Roumeen (2006). 'Melihat ke Balik Kaca: Apa yang Diberitakan Media dan Mengapa-Sebuah Tinjauan Menyeluruh', dalam Hak Memberitakan :Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.
- McQuail, Denis. (1991). Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

- Robert L Stevenson, (1995) "Freedom of the Press Around the World" , dalam John C Merrill (Ed) Global Journalism- Survey of International Communication. Third Ed.White Plains,N.Y.: Longman. hal.63-67.
- Severin ,Werner J dan James W.Tankard Jr (2005).Teori Komunikasi-Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa. Alihbahasa Sugeng Hariyanto. Jakarta: Prenada Media.
- Subiakto, Henry (1997). 'Dominasi Negara dan Wacana Pemberitaan Pers', dalam Masyarakat dan Negara , Basis Susilo (ed). Surabaya: Airlangga University Press. Hlm.91-99.**Undang-undang** : UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.